

ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN  
KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU  
AKRUAL DI DESA ONOZITOLI  
SIFAOROASI KECAMATAN  
GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI

*By* MEI CAHYANTI TELAUMBANUA

**2**  
**ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN**  
**BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI**  
**SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI**  
**KOTA GUNUNG SITOLI**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh :**  
**MEI CAHYANTI TELAUMBANUA**  
**NIM. 2121016**

**71**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NIAS**  
**2024**

**2**  
**ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN**  
**BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI**  
**SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI**  
**KOTA GUNUNG SITOLI**

**TUGAS AKHIR**

**12**  
Diajukan Kepada:  
Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan  
Program Diploma Akuntansi

Oleh  
**MEI CAHYANTI TELAUMBANUA**  
**NIM 2121016**

**65**  
**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NIAS**  
2024

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas  
Menuju Akrua Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan  
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Nama : MEI CAHYANTI TELAUMBANUA

NIM : 2121016

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing,

Serniati Zebua, S.,E M.Si  
NIDN 0103098702

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si  
NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M  
NIDN 0111038208

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Tugas akhir <sup>2</sup> dengan judul analisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual di desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gunungsitoli kota gunung sitoli yang disusun oleh Mei Cahyanti Telaumbanua dengan NIM 2121016 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, Agustus 2024  
Dosen Pembimbing

Serniati Zebua, S.,E M.Si  
NIDN. 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS  
UNIVERSITAS NIAS  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: [mnj@unias.ac.id](mailto:mnj@unias.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mei Cahyanti Tel  
NIM : 2121016  
Program : Diploma  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

32

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang saya diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Yang Menyatakan

**Mei Cahyanti Telaumbanua**

NIM. 2121008







## KATA PENGANTAR

21 Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Desa Simae’asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. 44 Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa rapungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, 38 dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulisan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan. 20

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing.
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi. 58
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis. 33
5. Kepala Desa dan aparat desa seluruh masyarakat Desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gununngsitoli kota gunungsitoli karena telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hanya Doa yang dapat penulis berikan atas bantuan dan dukungannya. Kiranya kasih tuhan selalu menyertai dan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

**MEI CAHYANTI TEL**

NIM 2121016



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa sebagai tempat bersentuhan langsung pemerintah dengan masyarakat menjadi fokus pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di pedesaan. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat secara langsung dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta program-program Pemerintah terlaksana dengan lebih cepat karena desa merupakan salah satu lembaga pemerintah bidang-bidang kemajuan Indonesia dan peraturan desa sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat Onozitoli menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam konsep akuntansi berbasis akrual yang memerlukan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi banyak anggotanya. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dalam hal finansial maupun tenaga kerja, membuat implementasi sistem ini menjadi lebih sulit. Keterbatasan dalam akses teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan, karena akuntansi berbasis akrual sering kali memerlukan sistem dan perangkat lunak yang lebih canggih dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Perubahan budaya dan kebiasaan kerja yang diperlukan untuk beralih dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual juga memerlukan waktu dan adaptasi. Di sisi lain, regulasi dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah dan otoritas lokal sangat penting untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif. Keberlanjutan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari pemimpin masyarakat dan individu, juga merupakan faktor kunci untuk sukses dalam jangka panjang.

Masyarakat di Desa Onozitoli Sifaoroasi sebelumnya menggunakan basis kas dalam pencatatan akuntansi mereka, yang lebih sederhana dan hanya mencatat transaksi saat kas benar-benar diterima atau dibayar. Namun, dengan transisi menuju akuntansi berbasis akrual, di mana transaksi dicatat saat terjadi, baik kas sudah diterima atau belum, muncul berbagai permasalahan. Salah satu perbedaan utama antara kedua basis ini adalah transparansi dan akurasi laporan keuangan. Basis kas tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum direalisasikan,

sehingga kurang memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan. Sementara itu, basis akrual menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mencatat semua aset dan kewajiban. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan akuntansi berbasis akrual, keterbatasan sistem dan infrastruktur pencatatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berhak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. UU Desa menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang cukup untuk dapat mengelola potensi yang ada guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Mereka mempunyai kekuasaan untuk mengatur administrasi, menyusun rencana pembangunan desa dan melaksanakannya secara mandiri. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan mandiri pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki desa, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, perangkat desa mempunyai tugas yang cukup berat karena desa merupakan unit yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saat ini, peran perangkat desa sangat penting untuk mendukung segala bentuk kegiatan pembangunan (Putri 2019)..

Menurut (Indonesia 2014), ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa wakaf desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa dengan adanya hak dan kewajiban akan menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut ketentuan hukum yang telah ditetapkan, menurut UU No. Nomor 17 Tahun 2003, PP. Tanggal 24 Tahun 2005. PP No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 13 Tahun 2006 mengatur bahwa pemerintah wajib menyusun laporan penjelasan keuangan yang meliputi laporan pelaksanaan

4

anggaran, laporan posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan Bukti Pelaporan Lembaga Keuangan (CaLK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi publik merupakan konsep dasar bagi penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan memberikan acuan bagi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, lembaga pelaporan keuangan, melakukan audit dan menggunakan laporan keuangan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul. belum dikelola oleh pemerintah. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintahan desa sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, terutama dengan sistem anggaran tradisional yang berbasis kas yang kurang memadai untuk mengelola kebutuhan yang semakin kompleks dan transparan. Adopsi akuntansi berbasis akrual muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan desa serta memperbaiki kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Persyaratan peraturan dan standar akuntansi, termasuk pengaruh dari inisiatif internasional seperti IPSAS, juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional tentang adopsi akuntansi berbasis akrual di tingkat desa. Meskipun transisi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, manfaat jangka panjangnya mencakup peningkatan transparansi, potensi penghematan biaya, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan desa

Desa Onozitoli Sifaoroasi. Desa ini terletak di wilayah pedalaman yang subur dengan topografi berbukit, dikelilingi oleh hamparan perkebunan milik warga desa. Onozitoli Sifaoroasi memiliki populasi sekitar kurang lebih 1500 penduduk yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan sayuran. Desa ini memiliki infrastruktur dasar yang terbatas, dengan akses jalan utama yang menghubungkan desa dengan desa terdekat yang lebih bagus, serta jaringan listrik yang telah mencakup sebagian besar desa tersebut.

Masyarakat Desa Onozitoli Sifaoroasi dikenal akan keramahan dan kebersamaannya, Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan infrastruktur, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi pendorong utama untuk kemajuan desa kedepan.

4 Akuntansi pemerintah tidak berbeda dengan akuntansi umum. Akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, khususnya analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, dan laporan keuangan..

6 Akuntansi secara umum merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan suatu perusahaan. Laporan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (manajemen) atau tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### 30 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah pada penelitian yang telah dikemukakan, masalah permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu “Bagaimana menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual?”

### 28 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual.

### 1.4 Manfaat Penelitian

-Untuk Desa

Manfaat kajian bagi Desa Onozitoli Sifaoroasi adalah untuk mengetahui manfaat penerapan akuntansi desa yang baik, yang nantinya menjadikan Desa Onozitoli Sifaoroasi menjadi desa yang baik dalam perencanaan keuangan desa dan dapat menjadi percontohan bagi desa lainnya.

37 -Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang penerapan akuntansi pada Otoritas Desa Onozitoli Sifaoroasi.

15 -Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat tugas akhir yang sejenis.

### 7 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam kerangka penelitian ini, penulis menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan Kepala desa, dan bendahara.

### 1.5.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Onozitoli Sifaoroasi kecamatan Gunungsitoli

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi untuk menganalisa sistem secara umum dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari cara-cara membangun sistem yang baik untuk digunakan dalam perusahaan.
- 2 Melakukan wawancara dengan kepala Desa, bendahara desa, untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses sistem yang sedang berjalan atau digunakan.

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif dalam proses analisis kualitatif yakni pendekatan menganalisis yang merinci dan menguraikan berbagai informasi yang menjadi suatu objek penelitian. tanpa melibatkan perhitungan statistik maupun data numerik. pendekatan ini melibatkan perbandingan antara fakta yang ada dengan teori yang berlaku pada Desa Onozitoli Sifaoroasi

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Akuntansi pemerintah

## 2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi secara umum dibagi menjadi akuntansi swasta dan akuntansi publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan alat analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan NGGI, seperti dana publik sub-negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, proyek kemitraan publik-swasta, dll. Karakteristik akuntansi sektor publik yaitu (Lestari Niu, Karamoy, Tangkuman, 2014):

1. Negara tidak mencari keuntungan.
2. Negara-negara mencatat anggarannya pada saat pencatatannya.
3. Berbagai jenis dana dapat digunakan dalam akuntansi publik.
4. Dalam akuntansi pemerintahan, belanja modal seperti bangunan dan kendaraan dicatat dalam perkiraan neraca dan hasil usaha.
5. Dalam akuntansi pemerintahan, neraca tidak memuat perkiraan ekuitas dan laba ditahan

Akuntansi publik dibedakan menjadi akuntansi publik dan akuntansi jaminan sosial.. Menurut Nordia One, Putradhan Rahmawati (2012:4) dalam (Tulangow dan Ilat 2014) Hal ini menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan diri pada pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi pada instansi pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa data akuntansi digunakan untuk akuntansi pemerintahan. memberikan Informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan nasional yang melibatkan instansi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya (non-profit Organization). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintah daerah agar dapat diterapkan secara seragam pada seluruh pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah menggunakan beberapa standar akuntansi: basis kas, basis kas, basis akrual, dan basis akrual. (GOOD 2015).

## 2.2 Berbasis Akrual

## 2.2.1 Definisi berbasis akrual

Laut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:11) dalam (Alwie dkk. 2020), Akuntansi akrual adalah standar akuntansi yang mencatat dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



Menurut Jan Hocsada (2015:78), akuntansi akrual adalah suatu metode akuntansi yang mana pendapatan dicatat pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan penerimaan kas (arus masuk awal atau akhir, atau penerimaan kredit)., pengeluaran dicatat pada saat terjadinya (dibayar di muka, dibayar tunai, atau terjadi meskipun belum dibayar), tanpa memperhatikan penerimaannya.

Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual dapat mencapai tujuan pelaporan yang tidak dapat dicapai dengan basis kas. Tujuan pelaporan adalah untuk keperluan pengurusan dan pengawasan. Beberapa permasalahan dapat diidentifikasi dalam penerapan akuntansi akrual, antara lain Bastian (2010:120).

1. Pencatat menentukan pos dan jumlah transaksi yang akan dicatat dalam jurnal.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas jika dikaitkan dengan akuntansi historis dan akuntansi historis.
3. Penyesuaian akrual memerlukan prosedur administrasi yang lebih rumit dan biaya manajemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan basis tunai.
4. Peluang terjadinya manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Akuntansi akrual bertujuan untuk mengatasi kekurangan akuntansi kas dalam menyediakan data yang lebih akurat.

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya-biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan melalui penggunaan informasi yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan basis uang tunai.

### 2.2.2 Tujuan Penggunaan basis akrual

Tujuan penggunaan akuntansi akrual adalah:

- a) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- b) untuk meningkatkan administrasi perpajakan dan pengelolaan aset;
- c) untuk meningkatkan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa oleh negara; Begitulah adanya.
- d) memberikan informasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- e) mereformasi sistem anggaran; dan
- f) meningkatkan transparansi mengenai biaya layanan yang disediakan oleh pemerintah. (Margareta, 2015) SE

### 2.2.3 Manfaat Basis Akrual

Keuntungan menggunakan akuntansi

- a) akrual Gambaran lengkap mengenai keadaan <sup>1</sup>keuangan pemerintah;
- b) Informasi tersebut <sup>1</sup>sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah.
- c) Lebih familiar bagi lebih banyak orang dan lebih lengkap dalam menyajikan informasi.
- d) Standar yang diterima secara luas.
- e) Memperkuat pengelolaan dan pembangunan

## <sup>1</sup>2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

### 2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74-71 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2014). Menurut KSAP (Badan Standar Akuntansi Pemerintahan), standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, termasuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang konteks yang jelas dan transparan. akuntabilitas penerapan akuntan publik, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (KSAP, 2015). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman wajib dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penjelasannya..

## <sup>1</sup>2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

### 2.4.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ayat (8) pasal 1 dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah SAP mengakui pendapatan, beban aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan terutama berdasarkan basis akrual serta akuntansi pendapatan, pengeluaran dan keuangan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. atas dasar yang sama sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBD.2.4.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual

Mereformasi akuntansi publik dari akuntansi kas menjadi akuntansi akrual tidaklah mudah. Yang tak kalah penting, tidak mudah mengubah praktisi (SDM) yang sudah familiar dengan kebijakan lama. Namun perlu diingat bahwa

1 akuntansi akrual diperlukan agar informasi yang disajikan dapat disajikan secara transparan dan bertanggung jawab. Standar akuntansi publik berbasis akrual diterapkan di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi berbasis akrual disajikan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan memuat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Peralihan dari akuntansi kas ke akuntansi akrual menjadi akuntansi akrual penuh berdampak pada pencatatan dan jenis laporan keuangan yang disusun. Kapan akrual harus diselesaikan secara penuh untuk mencerminkan kemajuan, transaksi atau kejadian, keuntungan yang didapat dengan menerapkan regularisasi T adalah representasi informasi operasional atau operasional. Dalam akuntan publik, menggambarkan perkembangan operasi atau kegiatan, disusun sebagai laporan operasi atau laporan surplus atau defisit. Dengan terbitnya PP No. Menurut Perpres 71 Tahun 2010, penerapan standar akuntansi publik berbasis akuntansi akrual mempunyai dasar hukum. Terbitnya Permendagri 64 tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi akrual yang diterapkan sejak tahun 2015. Artinya pemerintah wajib segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggal 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan adanya piutang, Aset tetap, Hutang mencerminkan proses akuntansi yang dipengaruhi oleh prinsip akuntansi akrual. Perbedaan nomor PP. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24/2005, tentang Komponen Laporan Keuangan,

**tabel 2.1 Komponen Laporan Keuangan**

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Arus Kas	3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Laporan Operasional
	6. Laporan Perubahan Ekuitas
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber:olahan penulis

1 Penyajian laporan keuangan sesuai PP No. 71 Tahun 2010,

1. Laporan pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah menunjukkan kepatuhan terhadap APBN/APBD.

Laporan pelaksanaan anggaran menyajikan gambaran mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan. ILMU TINGGI.

- 5 2. Laporan perubahan saldo anggaran Menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran pada tahun referensi dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan perimbangan anggaran lebih sebanding dengan periode sebelumnya dengan isi sebagai berikut:
  - a) Menyeimbangkan anggaran sebelumnya
  - b) Memanfaatkan kelebihan saldo anggaran
  - c) Kurang lebih sisa saldo anggaran tahun berjalan
  - d) Memperbaiki kesalahan akuntansi tahun sebelumnya
  - e) Dst.
  - f) Saldo anggaran akhir
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelapor dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Setiap unit pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan aset serta liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Setiap unit pelaporan menyajikan setiap item aset dan liabilitas termasuk jumlah – jumlah yang diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, kegunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal rintangan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan konversi.
5. Laporan operasional disajikan sebagai berikut: Pendapatan-LO dari aktivitas operasi, Pengeluaran dari aktivitas operasi, Surplus/defisit dari aktivitas non-operasional jika ada, Pos Luar Biasa jika ada, Surplus/defisit-LO. Bagian, judul, dan subtotal tambahan disajikan dalam laporan operasi sebagaimana disyaratkan oleh standar ini atau sebagaimana diperlukan untuk menyajikan secara wajar hasil operasi entitas pelapor.
6. 6. Laporan perkembangan ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian data laporan pelaksanaan anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, akuntansi neraca, dan pelaporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diperlukan dan direkomendasikan untuk diungkapkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan penyajian yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

nomor PP. Pasal 71 Tahun 2010 menjelaskan keuangan daerah adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, badan pengawas dan lembaga audit
3. Pihak yang tergabung dalam masyarakat dan berperan dalam proses donasi, investasi dan peminjaman
4. Pemerintah (Niu, 2015 )

#### 2.4.3 Kendala Penerapan SAP Berbasis AkruaI dalam PP 71 Th 2010

Hambatan penerapan standar akuntansi publik berbasis akrual antara lain:

Hambatan penerapan standar akuntansi publik berbasis akrual antara lain:

1. Kompleksitas informasi keuangan. Jumlah laporan yang harus disiapkan Pemerintah semakin bertambah, yaitu 6 laporan dan 1 CALK, selain laporan utama dan sub-laporan. Kekuasaan ini dapat mempengaruhi perubahan sistem akuntansi pemerintahan, yang pada akhirnya akan menghasilkan alokasi anggaran yang cukup besar.
2. Kondisi pemerintah. Syarat yang ditetapkan pemerintah antara lain perlunya sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan PP No. 24 tahun 2015, belum sepenuhnya sesuai dengan PP. Hal ini terbukti melalui banyaknya laporan keuangan yang mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat berdampak pada timeline penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan serta berdampak pada tahap audit BPK RI karena banyak laporan yang disusun berdasarkan SAP terlebih dahulu. Itu sesuai PP. No.24 Tahun 2005.
4. Status pengendalian intern Pemerintah belum memadai.

**2.5 Peranan Sumber Daya Manusia dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual,**

Manusia adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh bisnis/organisasi. Ada banyak definisi yang digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010), ada tiga definisi sumber daya manusia:

1. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan organisasi
2. Sumber daya manusia merupakan potensi, aset, fungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis, yang dapat ditransformasikan menjadi potensi material yang nyata, bukan potensi material untuk mewujudkan eksistensi organisasi. perusahaan. organisasi
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang menjadi penggerak suatu organisasi untuk mencapai eksistensinya.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan memahami permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi SAP. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pemahaman dan penerapan metode, teknik, dan peraturan dalam standar akuntansi negara, sehingga penyusunan laporan keuangan juga akan salah dan terlambat disampaikan

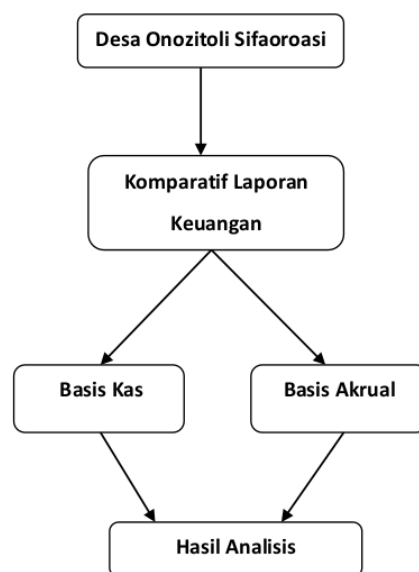
**2.5.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.5.1 penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti & Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Friska Langelo & David Paul Elia Saerang Universitas Sam Ratulangi Manado (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual.
2.	Sony Lamonisi Universitas Sam Ratulangi Manado (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon	Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berbuah menjadi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015.
3.	Nursakilah Lubis & Nurlaila Nurlaila Universitas	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas	Penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

	Islam Negeri Sumatera Utara (2022)	<sup>23</sup> Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal	Mandailing Natal digolongkan dalam tahap persiapan menuju kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
4	<sup>16</sup> Anastasya A. Lasabuda & Jenny Morasa & Victorina Z. Tirayoh S <sup>16</sup> Ratulangi University (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrua! atas penyajian laporan keuangan mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif.

### 2.6 kerangka pemikiran



## BAB III PEMBAHASAN

47

### 3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Onozitoli Sifaoroasi terletak di kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani, dengan hasil pertanian utama berupa kelapa, karet, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Desa ini masih memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih terjaga. Akses ke desa ini cukup terbatas, dengan infrastruktur jalan yang masih dalam pengembangan, sehingga menjadikannya lokasi yang relatif terpencil namun penuh dengan kekayaan budaya dan alam yang belum banyak tersentuh.

Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi adalah pusat administrasi pemerintahan desa yang melayani masyarakat setempat dalam berbagai urusan dan kebutuhan administratif. Kantor ini terletak di tengah-tengah desa, sehingga mudah diakses oleh seluruh warga desa. Bangunan kantor desa biasanya sederhana, namun fungsional, dengan ruang-ruang yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ruang kepala desa, ruang rapat, dan ruang pelayanan masyarakat.

Di kantor desa ini, berbagai layanan disediakan, termasuk pengurusan surat menyurat seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili, dan surat-surat lain yang diperlukan oleh warga. Selain itu, kantor desa juga berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Kantor desa ini juga menjadi pusat koordinasi bagi berbagai program dan kegiatan desa, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Misalnya, program-program pertanian, kegiatan gotong royong, hingga penyelenggaraan acara adat sering kali dikoordinasikan melalui kantor desa ini. Kepala desa beserta perangkatnya bertugas memastikan bahwa seluruh program desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.



### 3.1.2 Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Onozitoli Sifaoroasi

Sejarah singkat desa onozitoli sifaoroasi merupakan sebuah wilayah yang berada dikecamatan Gunungsitoli. Dan menurut beberapa tokoh masyarakat desa onozitoli sifaoroasi awalnya bernama "HILI ONOZITOLI", nama tersebut berdasarkan letak geografis yang berupa gunung dan dalam istilah Harafia HILI ONOZITOLI diartikan sebagai hili siteoli.

Seiring semakin padatnya penduduk hili onozitoli, maka beberapa masyarakat desa memperluas wilayahnya dan bermukim disebuah wilayah bersebelahan dengan onozitoli yang namanya sifaoroasi. Sehingga saat ini dinamakan desa onozitoli sifaoroasi, kemudian kepala kampung desa onozitoli sifaoroasi yang masih di ingat sampai ini yang pertama yaitu **Sarao Telaumbanua** dalam panggilan mbalugu lai mbaluo. Pada tahun 1970 perkiraan pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa atas nama **FATOLOSA LASE** dan dia berasal dari unsur tentara, dan sejarah singkat tentang desa onozitoli sifaoroasi. Kemudian tentang perkembangan hingga saat ini desa onozitoli sifaoroasi sekarang ditambah dengan penduduk yang begitu banyak kurang lebih 2159 yang terdata di Dinas Kependudukan.

Demikian juga mata pencaharian penduduknya semuanya beralih dari pertanian, perkebunan dan bahkan sekarang lahan pertanian berkurang mereka bekerja sebagai buruh harian lepas. Dan itulah sejarah singkat perkembangan desa onozitoli hingga saat ini. Perkembangan desa onozitoli sifaoroasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang dimana jumlah kelahiran lebih banyak di bandingkan jumlah kematian. Ditambah lagi dengan perpindahan dan mutasi penduduk, sebagian besar berpindah dan sebagian juga masuk ke desa onozitoli sifaoroasi sehingga perkembangan dari tahun ke tahun tetap naik.

<sup>73</sup> Masalah keuangan desa telah diatur didalan peraturan Permendagri nomor 46 tahun 2016 bahwa kepala desa atau pemerintahan desa berkewajiban memberikan informasi kepada warga masyarakat secara transparan baik pertanggungjawaban keuangan yang dimana 2 tempat papan informasi tentang laporan keuangan desa pertanggungjawaban 2023.

### **7** 3.1.3 Visi Misi Desa Onozitoli Sifaoroasi

#### **Visi :**

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan desa Onozitoli Sifaoroasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Onozitoli Sifaoroasi seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa Onozitoli Sifaoroasi adalah :

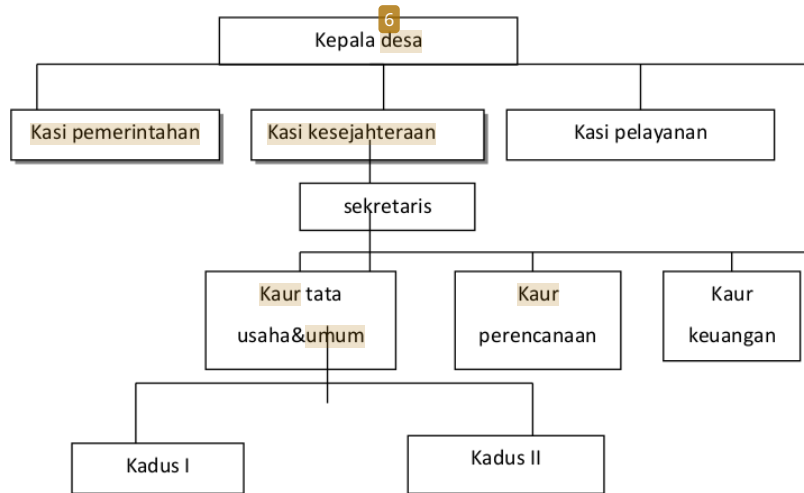
1. Sehat (Jasmani dan Rohani)
2. Nyaman dan Tentram
3. Berbudaya dan Berkarakter
4. Sejahtera
5. Maju

#### **Misi :**

Untuk Menmpertanggungjawabkan Visi di atas diperlukan upaya melalui kegiatan yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan serta menguatkan fungsi dan kinerja pemerintah desa Onozitoli Sifaoroasi secara efektif dan efesien yang berbasis pada pelayanan masyarakat yang adil dan merata berlandaskan takut akan Tuhan.
2. Mengintegrasikan fungsi antar lembaga yang ada di desa Onozitoli Sifaoroasi secara harmonis dan berkesinambungan.
3. Menselaraskan program pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan memaksimalkan penggunaan dana desa yang bersifat Swakelola masyarakat serta menguatkan kegiatan usaha masyarakat melalui badan usaha Milik Desa (BUM Des).

### 3.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Onozitoli



### 3.1.5 Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa

1. Kepala desa, sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola semua aspek pemerintahan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.
2. Kasi Pemerintahan, di bawah kepala desa, fokus pada urusan administratif dan hukum, termasuk pelaksanaan peraturan desa dan pengawasan kegiatan pemerintahan.
3. kasi Kesejahteraan bertugas memastikan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat berjalan efektif, termasuk bantuan sosial dan kesehatan.
4. Kasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik sehari-hari, seperti administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat.
5. Sekretaris Desa mengelola administrasi internal desa, menyusun laporan, dan mendukung kepala desa dalam tugas-tugas administratif.
6. Kaur Tata Usaha dan Umum mengelola dokumen, arsip, dan kebutuhan umum desa, serta mendukung kegiatan administrasi dan komunikasi.
7. Kaur Perencanaan bertugas menyusun rencana pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya, memastikan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
8. Kaur Keuangan mengelola anggaran dan laporan <sup>48</sup> keuangan desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
9. Kepala Dusun, sebagai perwakilan kepala desa di tingkat dusun, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun, menyampaikan aspirasi masyarakat dusun kepada kepala desa, serta membantu dalam pelaksanaan program-program desa di wilayahnya.

### 3.2 Pembahasan

#### “Bagaimana Menganalisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual”?

Menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual melibatkan perbandingan antara laporan yang disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan laporan yang mencatat transaksi pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Langkah pertama dalam analisis ini adalah memahami perbedaan antara basis kas dan basis akrual, di mana basis kas mencatat pendapatan dan beban hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan, sementara basis akrual mencatat transaksi pada saat pendapatan diperoleh atau kewajiban diakui. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi item-item seperti piutang, utang, pendapatan diterima dimuka, dan beban dibayar dimuka yang membedakan kedua basis ini. Untuk melakukan analisis, laporan keuangan berbasis kas perlu disesuaikan ke basis akrual dengan menambahkan piutang dan beban yang masih harus dibayar, serta menghapus pendapatan diterima dimuka dan beban dibayar dimuka. Analisis ini mencakup perbandingan antara komponen-komponen laporan keuangan berbasis kas ke komponen-komponen laporan keuangan berbasis akrual.

#### Komponen laporan keuangan

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	8. Laporan Realisasi Anggaran
7. Neraca	9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8. Laporan Arus Kas	10. Neraca
9. Laporan Perubahan Ekuitas	11. Laporan Arus Kas
10. Catatan Atas Laporan Keuangan	12. Laporan Operasional
	13. Laporan Perubahan Ekuitas
	14. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 2.2 komparatif laporan keuangan

komponen	Basis kas	Basis akrual
Laporan realisasi anggaran (LRA)	Menampilkan pendapatan dan belanja ketika kas diterima atau dibayarkan	Menunjukkan pendapatan dan belanja sesuai anggaran namun tidak memperhitungkan piyang dan utang belum terjadi
Laporan perubahan saldo anggaran lebih(sal)	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan perubahan dalam saldo anggaran lebih(sal) yang dihasilkan surplus atau devisa anggaran

neraca	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.
Laporan operasional	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan seluruh pendapatan dan beban pemerintah dalam periode akuntansi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Arus kas	Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.	Basis kas, tetapi sebagai pelengkap laporan berbasis akrual untuk menunjukkan perubahan kas
Laporan perubahan ekuitas	Tidak tersedia dalam basis kas	Menunjukkan perubahan ekuitas selama periode akuntansi, termasuk surplus atau defisit, koreksi, dan penyesuaian lainnya.
Catatan atas laporan keuangan	Terbatas atas informasi kas yang relevan.	Menyajikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, estimasi penting, serta penjelasan tambahan terkait item dalam laporan keuangan dalam berbasis akrual

Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual pada pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pencatatan dan pelaporan. Pada basis kas, laporan yang disajikan lebih terbatas hanya mencakup Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, di mana pendapatan diakui saat kas diterima, dan belanja diakui saat kas dibayarkan. Tidak ada laporan yang mencerminkan posisi keuangan atau operasional secara keseluruhan, seperti neraca atau laporan operasional, karena basis kas tidak mencatat piutang, utang, atau aset tetap.

Sebaliknya, laporan keuangan berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keuangan pemerintah. Basis akrual tidak hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran tetapi juga memperkenalkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan perubahan surplus atau defisit anggaran. Neraca menjadi komponen utama dalam basis akrual, menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan mencatat seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Selain itu, Laporan Operasional

mencakup seluruh pendapatan dan beban, tidak tergantung pada penerimaan atau pembayaran kas, yang memberikan wawasan tentang kinerja operasional pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas dalam basis akrual tetap relevan dan disajikan untuk melengkapi laporan keuangan lainnya dengan menunjukkan perubahan kas selama periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga diperkenalkan untuk mengungkapkan perubahan ekuitas pemerintah yang tidak hanya berasal dari surplus atau defisit, tetapi juga penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas secara langsung. Catatan atas Laporan Keuangan dalam basis akrual memberikan informasi yang lebih rinci dan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi dan estimasi penting, yang tidak ditemukan dalam basis kas.

### **Laporan realisasi anggaran (LRA)**

LRA pada laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis akrual tidak menunjukkan adanya perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan SAP. LRA disajikan secara tunai baik dalam laporan keuangan berbasis CTA maupun laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan LRA kedua laporan keuangan tersebut terletak pada kategori pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan tertentu yang tidak selalu sama setiap tahunnya. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Pendapatan transfer berupa dukungan finansial dari pemerintah provinsi lain yang hanya terdapat pada LRA 2015, serta pendapatan lain yang sah berupa pendapatan subsidi yang tidak hanya terdapat pada LRA 2014. 2. Perbedaan jenis belanja, khususnya belanja operasional berupa belanja bantuan keuangan hanya terdapat pada LRA 2014. 3. Selisih transfer berupa bantuan keuangan lainnya hanya terdapat 18 pada LRA 2015.

### **Laporan Perubahan SAL**

Pelaporan perubahan SAL hanya disajikan dalam laporan keuangan dengan basis akrual. Laporan revisi SAL disusun berdasarkan kas tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan berbasis CTA. Akun SAL muncul dalam laporan keuangan dengan basis akrual sebagai rekonsiliasi dengan akun pendapatan dan pengeluaran LRA. Sedangkan di database CTA, pemasukan dan pengeluaran ditelusuri langsung ke kas sehingga tidak pernah ada rekening SAL. Laporan Perubahan SAL menyajikan SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan hibah tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, penyesuaian akuntansi tahun sebelumnya, dan lain-lain, serta SAL final.

## **Neraca**

Baik metode akrual maupun metode CTA menggunakan metode akrual untuk mengakui, mengukur, dan mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas. Oleh karena itu, informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan pada neraca menurut akuntansi berbasis akrual sama/mirip dengan informasi pada neraca menurut metode akuntansi berbasis akrual. Perbedaan yang timbul hanya pada bentuk klasifikasi dan jenis akun yang disajikan. Misalnya, dalam neraca berbasis CTA, akun-akun dari jurnal berwarna akan disajikan untuk memperhitungkan aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual. Perbedaan pelaporan keuangan antara neraca akrual dan neraca CTA meliputi:

1. Neraca berbasis akrual memberikan informasi tentang akun-akun yang ditangguhkan. Neraca akrual menyajikan informasi mengenai pendapatan/beban yang diterima/dibayar dimuka (dibawa ke depan) dengan menggunakan metode aset/liabilitas. Pencatatan ini tidak tercermin dalam neraca berbasis CTA, karena basis CTA mengakui pendapatan dan beban/beban secara tunai, dengan demikian pendapatan yang diterima di muka dan beban/beban yang dibayarkan akan diakui dan dicatat segera pada saat kas atau setara kas diterima/dibayar. Dampak dari perbedaan tersebut adalah neraca akrual dapat memberikan informasi mengenai nilai barang/jasa yang belum diterima/wajib disediakan di masa yang akan datang relatif terhadap uang tunai yang telah dibayarkan/diterima. sebelum.
2. Neraca berbasis akrual menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang ditangguhkan (accruals). Informasi ini termasuk dalam piutang dan kewajiban, seperti piutang pajak, piutang pajak, utang bunga, dll. Neraca berbasis CTA juga mencatat piutang untuk mengakui potensi pendapatan yang akan diterima dan telah didukung dengan dokumen yang sah seperti surat nasehat perpajakan, namun belum diterima kas/setara kas. Untuk transaksi ini, piutang usaha dan penyisihan piutang (bukan pendapatan) dicatat. Sedangkan untuk beban ditangguhkan, neraca berbasis CTA hanya mengakui utang bunga saja dan tidak mengakui/mengakui beban utang lain-lain, misalnya: Dampak dari selisih ini adalah Neraca akrual dapat memberikan informasi mengenai nilai pendapatan/beban yang terutang, telah diakui dan diakui sebagai pendapatan/beban, namun hanya kas/beban yang setara kas yang belum diterima/dibayar.



3. Neraca berbasis akrual memberikan informasi mengenai akumulasi penyusutan aset tetap. Dalam metode akumulasi, penyusutan aset tetap dicatat sebagai beban penyusutan yang disajikan dalam LO dan akumulasi beban penyusutan disajikan dalam neraca. Dalam database CTA, transaksi yang berkaitan dengan aset tetap, seperti pembelian, penjualan, dan penyusutan aset tetap, dicatat pada akun aset tetap dan investasi pada akun aset tetap. Informasi aset tetap yang disajikan dalam neraca berdasarkan CTA tidak lengkap karena hanya menampilkan nilai bersih aset tetap pada tanggal pelaporan dan tidak menunjukkan nilai penyusutan aset tetap yang telah disesuaikan sampai dengan tanggal pelaporan. Dampak dari perbedaan tersebut adalah neraca akrual dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aktiva tetap sejak digunakan hingga tanggal neraca.

2  
4. Neraca berbasis akrual menyajikan ekuitas yang menunjukkan nilai kekayaan bersih Negara yang dibentuk dari akun-akun pembentukan ekuitas berbasis akrual, khususnya surplus/defisit LO, serta kenaikan/penurunan ekuitas karena penyesuaian mendasar. Pada saat yang sama, ekuitas dana dalam neraca berbasis CTA tidak sepenuhnya mencerminkan penyajian ekuitas berbasis akrual. Dana saham hanya berisi akun-akun yang muncul karena memiliki jurnal berwarna yang membantu dalam pencatatan dan pencatatan aset dan kewajiban secara akrual. Selain itu, pada ekuitas dana juga terdapat SILPA/SiKPA yang dihitung secara tunai. Ekuitas dana dalam neraca berbasis CTA hanya digunakan untuk menyeimbangkan aset dan kewajiban dan tidak benar-benar mencerminkan kekayaan bersih pemerintah. Dampak dari perbedaan tersebut adalah neraca akrual menunjukkan nilai ekuitas yang mewakili nilai riil kekayaan bersih pemerintah yang rinciannya disajikan dalam EPL.

### **LAPORAN OPERASIONAL(LO)**

3  
LO disajikan dalam laporan keuangan dengan basis akrual saja. Berdasarkan CTA, entitas pelapor diperbolehkan menyusun laporan kinerja keuangan yang menyajikan pendapatan, belanja, dan surplus/defisit berdasarkan basis akrual. Namun, melaporkan kinerja keuangan ini tidak wajib. LO melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan surplus/defisit berdasarkan basis akrual, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima/dicairkan. LO menyajikan pendapatan, pengeluaran LO, surplus/defisit aktivitas operasi,

surplus/defisit aktivitas non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit dari LO. Komposisi pendapatan LO hampir sama dengan LRA. Namun pendapatan LO disajikan berdasarkan basis akrual, sedangkan pendapatan LRA disajikan berdasarkan basis kas. Biaya LO disajikan dengan menggunakan metode akuntansi akrual. Dengan akuntansi akrual, LO menyajikan komponen biaya yang tidak berbasis kas. Biaya-biaya ini meliputi:

Biaya persediaan merupakan nilai persediaan bekas/usang (bukan nilai persediaan yang dibeli) selama periode pelaporan. Biaya persediaan timbul setelah penyesuaian nilai persediaan yang dimiliki selama periode berjalan dikurangi sisa persediaan pada akhir periode. Dampak dari penyajian akun biaya persediaan adalah LO dapat memberikan informasi mengenai nilai persediaan yang telah terpakai/usang selama periode pelaporan. Selain itu, biaya persediaan dihubungkan dengan nilai persediaan yang disajikan dalam neraca secara akrual pada tanggal pelaporan, sehingga menegaskan keandalan nilai persediaan yang dilaporkan dalam neraca.

1. **Beban penyusutan aktiva tetap** merupakan hilangnya nilai aktiva tetap sepanjang masa manfaat aktiva tetap tersebut. Biaya penyusutan tidak muncul di database CTA. Dalam database CTA, penyusutan aset tetap dicatat secara langsung sebagai penurunan nilai aset tetap dan investasi pada aset tetap. Dampak dari pelaporan beban penyusutan adalah LO dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aset tetap selama periode pelaporan.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** merupakan penyisihan yang harus dilakukan pada tingkat tertentu pada rekening piutang yang berkaitan dengan kolektibilitas utang piutang. Dengan dasar CTA, penyisihan piutang dicatat langsung sebagai pengurang piutang dan penyisihan piutang. Dampak presentasi
3. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah dimana LO dapat memberikan informasi mengenai nilai piutang yang belum dapat dipulihkan/dihapuskan selama periode akuntansi karena tidak dapat dipulihkan. LO menyajikan surplus/defisit aktivitas non-operasional termasuk surplus/defisit penjualan aset jangka panjang dan pembayaran liabilitas jangka panjang. LO juga menyajikan surplus/defisit pos-pos luar biasa termasuk pendapatan dan pengeluaran luar biasa..

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(LPE)

LPE disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan basis akrual saja. LPE menyajikan kenaikan/penurunan ekuitas selama periode pelaporan. LPE mempunyai hubungan dengan LO dan neraca. LPE memuat nilai lebih/defisit LO sebagai penambah/pengurang ekuitas dan menyajikan saldo akhir ekuitas untuk disajikan dalam neraca. LPE Pemkot Batu tahun 2015 menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan fundamental, penyesuaian fundamental yang berdampak langsung pada pemilik modal dan ekuitas akhir.

### LAPORAN ARUS KAS(LAK)

SAR pada laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis akrual tidak menunjukkan adanya perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan SAP. LAK disajikan secara tunai baik dalam laporan keuangan berbasis CTA maupun laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan SAR kedua laporan keuangan ini terletak pada jenis/sumber pendapatan dan bentuk pencairannya yang tidak selalu sama setiap tahunnya. LAK menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas konversi, kenaikan/penurunan bersih kas selama periode pelaporan, saldo kas awal yang dimulai dalam BUD, saldo akhir dalam BUD. , saldo kas awal di kasir kapitasi JKN, saldo kas akhir di kasir kapitasi JKN, dan saldo kas akhir.

26

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Lebih/(kuran g) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan asli</b>	<b>1.702.350,00</b>	1.702.350,00	0,00
4.1.1.	<b>desa</b>			
4.2.	Hasil usaha desa	1.702.350,00	1.702.350,00	0,00
4.2.1.	<b>Pendapatan transfer</b>	<b>1.287.033.375,00</b>	1.287.033.375,0	0,00
4.2.2.	Dana desa	7.604.000.00,00	7.604.000.00,00	0,00
4.2.3.	Bagi hasil pajak dan restribusi	29.964.285,00	29.964.285,00	0,00.
4.3.	Alokasi dana desa	469.465.090,00	469.465.090,00	0,00

4.3.6.	<b>7</b> Pendapatan lain lain	<b>0.00</b>	<b>1.517.261.00</b>	<b>(1.517.261.00)</b>
	Bunga bank	0.00	1.517.261.00	(1.517.261.00)
5	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.288.735.725.00</b>	<b>1.290.252.986.00</b>	<b>(1.517.261.00)</b>
5.1.	<b>BELANJA</b>			
5.1.1.	<b>31</b> Belanja pegawai	<b>327.496.360.00</b>	<b>327.496.360.00</b>	<b>0.00</b>
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	29.119.680.00	29.119.680.00	0.00
5.1.2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	229.025.620.00	229.025.620.00	0.00
5.1.3.	<b>14</b> Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	4.191.060.00	4.191.060.00	0.00
	Tunjangan BPD	65.160.000.00	65.160.000.00	0.00
5.1.4.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>515.244.139.00</b>	<b>501.402.749.00</b>	<b>13.841.390.00</b>
5.2.	Belanja barang	159.888.639.00	148.193.797.00	11.394.842.00
5.2.1.	<b>18</b> Belanja barang pelengkapan	104.750.000.00	102.050.000.00	2.700.000.00
5.2.2.	Belanja jasa honorarium	41.000.000.00	41.000.000.00	0.00
5.2.3.	Belanja perjalanan dinas	4.657.000.00	4.960.452.00	(303.452.00)
5.2.5.	Belanja operasional perkantoran	21.268.000.00	21.268.000.00	0.00
5.2.6.	<b>22</b> Belanja pemeliharaan	183.680.500.00	183.680.500.00	50.000.00
5.2.7.	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada			
	<b>Belanja modal</b>	<b>254.021.560.00</b>	<b>254.021.560.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.	<b>14</b> Belanja modal	24.1000.000.00	24.1000.000.00	0.00
5.3.2.	pengadaan peralatan, mesin dan alat			
	Belanja modal irigasi/embung/drainasee/air limbah	229.912.560.00	229.912.560.00	0.00
5.3.7.				
5.4	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>202.518.100.00</b>	<b>194.400.000.00</b>	<b>8.118.100.00</b>
	Belanja tidak terduga	202.518.100.00	194.400.000.00	8.118.100.00

5.4.1.	<b>Jumlah belanja</b>	<b>1.299.271.159.00</b>	<b>1.227.311.669.00</b>	<b>21.959.490.00</b>
			<b>0</b>	
6	<b>Surplus/(devisit)</b>	<b>(10.535.434.00)</b>	<b>12.941.317.00</b>	<b>(23.476.751.00)</b>
6.1.	<b>Pembiayaan</b>			
	<b>Penerimaan</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>00</b>
6.1.1.	<b>pembiayaan</b>			
	<b>SILPA tahun</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>00</b>
	<b>sebelumnya</b>			
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>10.535.434.00</b>	<b>00</b>
	<b>NETTC</b>			

24

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAN) G (Rp)
1	2	3	4	5
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	23.476.751.00	(23.476.751.00)

Dalam menganalisis laporan keuangan berbasis kas menuju akrual, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan berdasarkan data yang disajikan. Secara keseluruhan, laporan keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1.290.252.986,00 melebihi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.288.735.725,00 dengan selisih sebesar Rp1.517.261,00. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain dan bunga bank yang tidak direncanakan, yang menambah total pendapatan.

Di sisi belanja, realisasi belanja sebesar Rp1.227.311.669,00 juga lebih rendah dibandingkan anggaran Rp1.299.271.159,00, menghasilkan surplus belanja sebesar Rp21.959.490,00. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam komponen belanja barang dan jasa, terutama pada belanja operasional perkantoran yang mengalami kekurangan realisasi sebesar Rp303.452,00 dan belanja barang pelengkapan yang surplus sebesar Rp11.394.842,00.

Surplus anggaran di laporan kas menunjukkan bahwa setelah belanja, terdapat selisih surplus Rp12.941.317,00, sementara akumulasi SILPA tahun sebelumnya menunjukkan saldo yang positif sebesar Rp10.535.434,00. Sehingga,

total surplus pembiayaan adalah Rp10.535.434,00, meskipun ada selisih signifikan dalam laporan realisasi yang menunjukkan surplus yang lebih besar sebesar Rp23.476.751,00.

Perubahan dari basis kas ke akrual akan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang posisi keuangan desa, karena basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa catatan akuntansi yang lebih detail untuk mencerminkan pengakuan pendapatan yang mungkin belum direalisasikan dalam laporan kas. Penerapan basis akrual akan membantu dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan dan aliran dana desa secara keseluruhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan dari laporan keuangan berbasis kas ke berbasis akrual memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan desa. Laporan berbasis kas, meskipun sederhana dan mudah dipahami, hanya mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dibayar, sehingga sering kali tidak mencerminkan kewajiban dan pendapatan yang belum terealisasi. Sebaliknya, laporan berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan finansial desa dengan mencatat semua hak dan kewajiban yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa laporan berbasis kas menunjukkan surplus yang tampak lebih tinggi, sementara laporan berbasis akrual mengungkapkan adanya pendapatan yang masih harus diterima dan kewajiban yang belum dibayar, yang menyesuaikan perspektif keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peralihan laporan berbasis akrual di desa akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses transisi ke akrual harus dilakukan secara bertahap dengan pelatihan dan penyesuaian sistem yang memadai untuk memastikan manfaat maksimal dari perubahan ini.

## 3.2 SARAN

**Saran untuk Desa:** Meningkatkan pengelolaan keuangan dan transparansi, desa disarankan untuk mulai mempertimbangkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pelatihan bagi staf keuangan dan penyesuaian sistem akuntansi yang ada. Desa sebaiknya melakukan uji coba atau fase peralihan bertahap untuk memahami tantangan dan manfaat dari sistem akrual secara praktis. Penilaian berkala selama fase transisi akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala serta memastikan bahwa sistem baru dapat berfungsi dengan baik dan memberikan informasi keuangan yang lebih akurat.

**Saran untuk Peneliti Selanjutnya:** Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan studi mendalam mengenai dampak praktis dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di desa-desa yang telah menggunakannya. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup analisis cost-benefit dari implementasi akrual, serta

identifikasi tantangan operasional yang dihadapi oleh desa selama transisi. Studi kasus di berbagai desa dengan karakteristik berbeda juga akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas dan adaptasi sistem akrual. Penelitian ini sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan desa, seperti aparat desa dan masyarakat, untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai perubahan ini dan untuk mengembangkan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Adi Bagus Prasetio, Roni Andespa, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Kata Pengantar. 2020. "Tugas Akhir Tugas Akhir." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012* (1): 41–49.
- GOOD, GOOLMAN. 2015. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (April): 10–22.
- Indonesia, Undang-undang Republik. 2014. "https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm 1/44."
- Putri, S E. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura." <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6563%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6563/1/155310267.pdf>.
- Tulangow, Andre P., dan VentjeTreesje Runtu Ilat. 2014. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (4): 278–88.

# ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 46%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet	959 words — 12%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet	560 words — 7%
3	<a href="http://jimfeb.ub.ac.id">jimfeb.ub.ac.id</a> Internet	428 words — 5%
4	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet	288 words — 4%
5	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet	120 words — 1%
6	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet	106 words — 1%
7	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	93 words — 1%
8	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet	72 words — 1%
9	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	70 words — 1%

---

10	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet	49 words — 1%
11	<a href="http://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id">perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id</a> Internet	45 words — 1%
12	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet	38 words — < 1%
13	<a href="http://ejournal.unikama.ac.id">ejournal.unikama.ac.id</a> Internet	37 words — < 1%
14	<a href="http://jdih.pemalangkab.go.id">jdih.pemalangkab.go.id</a> Internet	36 words — < 1%
15	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet	32 words — < 1%
16	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet	28 words — < 1%
17	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet	26 words — < 1%
18	<a href="http://www.jdih.sukoharjokab.go.id">www.jdih.sukoharjokab.go.id</a> Internet	26 words — < 1%
19	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	24 words — < 1%
20	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet	24 words — < 1%
21	<a href="http://repository.bakrie.ac.id">repository.bakrie.ac.id</a> Internet	24 words — < 1%

---

22	<a href="http://sumberdadi-trenggalek.trenggalekkab.go.id">sumberdadi-trenggalek.trenggalekkab.go.id</a> Internet	24 words — < 1%
23	Nursakilah Lubis, Nurlaila Nurlaila. "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Crossref	23 words — < 1%
24	<a href="http://jdih.nganjukkab.go.id">jdih.nganjukkab.go.id</a> Internet	22 words — < 1%
25	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
26	<a href="http://mangli.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id">mangli.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id</a> Internet	21 words — < 1%
27	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%
28	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%
29	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%
30	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet	18 words — < 1%
31	<a href="http://kemanukan-bagelen.purworejokab.go.id">kemanukan-bagelen.purworejokab.go.id</a> Internet	17 words — < 1%
32	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	17 words — < 1%

33	Internet	16 words — < 1%
34	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet	15 words — < 1%
35	<a href="http://perpustakaan.poltektegal.ac.id">perpustakaan.poltektegal.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
36	<a href="http://repository.nobel.ac.id">repository.nobel.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
37	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
38	<a href="http://repository.polimdo.ac.id">repository.polimdo.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
39	<a href="http://desa-pagedangan.vercel.app">desa-pagedangan.vercel.app</a> Internet	12 words — < 1%
40	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet	12 words — < 1%
41	Efi Miftah Faridli, Bambang Sumardjoko, Harun Joko Prayitno, Sabar Narimo. "Rekonstruksi kepemimpinan pendidikan progresif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran: teori dan praktik", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2024 Crossref	11 words — < 1%
42	<a href="http://jdih.kebumenkab.go.id">jdih.kebumenkab.go.id</a> Internet	11 words — < 1%
43	<a href="http://journal.laaroiba.ac.id">journal.laaroiba.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%

---

44	<a href="http://repository.mercubuana.ac.id">repository.mercubuana.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
45	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
46	<a href="http://www.stie-66.ac.id">www.stie-66.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
47	<a href="http://ejurnal.undana.ac.id">ejurnal.undana.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
48	<a href="http://journal.epistemikpress.id">journal.epistemikpress.id</a> Internet	10 words — < 1%
49	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
50	<a href="http://repository.unand.ac.id">repository.unand.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
51	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
52	<a href="http://anambaskab.go.id">anambaskab.go.id</a> Internet	9 words — < 1%
53	<a href="http://diploma4stan.wordpress.com">diploma4stan.wordpress.com</a> Internet	9 words — < 1%
54	<a href="http://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
55	<a href="http://infoaceh.net">infoaceh.net</a> Internet	9 words — < 1%

---

[jurnal.ugm.ac.id](http://jurnal.ugm.ac.id)

56	Internet	9 words — < 1%
57	pt.scribd.com Internet	9 words — < 1%
58	repositori.usu.ac.id Internet	9 words — < 1%
59	repository.fe.unj.ac.id Internet	9 words — < 1%
60	repository.uksw.edu Internet	9 words — < 1%
61	repository.unisma.ac.id Internet	9 words — < 1%
62	123dok.com Internet	8 words — < 1%
63	Aizah Rahayu, Idang Nurodin, Sulaeman Sulaeman. "Analysis of Accrual-Based Government Accounting Standards Application to The Financial Reports of Regional Public Service Agency (BLUD)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2023 Crossref	8 words — < 1%
64	docplayer.info Internet	8 words — < 1%
65	es.scribd.com Internet	8 words — < 1%
66	gorontalo.bpk.go.id Internet	8 words — < 1%

67	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet	8 words — < 1%
68	<a href="http://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
69	<a href="http://lipsus.kompas.com">lipsus.kompas.com</a> Internet	8 words — < 1%
70	<a href="http://repo.poltekkes-medan.ac.id">repo.poltekkes-medan.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
71	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
72	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
73	<a href="http://sumberharjo.kabpacitan.id">sumberharjo.kabpacitan.id</a> Internet	8 words — < 1%
74	<a href="http://xjnineherryblog.wordpress.com">xjnineherryblog.wordpress.com</a> Internet	8 words — < 1%
75	<a href="http://danielstephanus.wordpress.com">danielstephanus.wordpress.com</a> Internet	6 words — < 1%
76	<a href="http://repository.syekhnurjati.ac.id">repository.syekhnurjati.ac.id</a> Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF